

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Keuangan Daerah**

##### **1. Pengertian Keuangan Daerah**

Pembentukan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.<sup>1</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang dapat diterapkan dalam keuangan daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Bandung: Citra Umbara, 2010)

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32&34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bandung: Citra Umbara, 2010)

Keuangan daerah berhubungan erat dengan hak dan kewajiban daerah terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan juga pemanfaatan barang milik daerah.<sup>3</sup> Pengertian keuangan daerah pun dijelaskan dalam UU Nomor 23 tahun 2014. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

## **2. Hubungan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah**

Pendekatan dalam memahami ruang lingkup keuangan daerah dapat dipandang dari sisi objek, subjek, proses dan tujuannya yaitu:<sup>4</sup>

### **a. Dari sisi objek**

Dari sisi objek, yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

---

<sup>3</sup> Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Bandung: PT Alumni, 2011), 35

<sup>4</sup> Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah...*37

hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD. Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang diberikan dalam penjelasan Pasal 156 ayat 1 Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang Pem'erintah Daerah yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, dan segala berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.

b. Dari sisi subjek

Subjek keuangan daerah adalah mereka yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini pemerintah daerah dan perangkatnya, perusahaan daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan daerah, seperti DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK).

c. Dari sisi proses

Keuangan daerah mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan pertanggungjawaban.

d. Dari sisi tujuan

Keuangan daerah meliputi keseluruhan kebijakan kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. dari penjelasan objek, subjek, proses dan tujuan tersebut pada dasarnya berada pada satu kegiatan yang disebut dengan pengelolaan keuangan daerah. Dalam menjalankan pengelolaan tersebut dikenal adanya kekuasaan pengelola. Pemegang kekuasaan mengelola keuangan di daerah adalah gubernur/bupati atau walikota selaku pemerintahan daerah.<sup>5</sup>

Dari ruang lingkup keuangan daerah, sebagaimana diuraikan diatas, akan selalu melekat dengan konsep anggaran teru't'a'ma terkait dengan APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Rencana pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam APBD merupakan salah satu bentuk instrument kebijakan ekonomi, yang mempunyai fungsi tersendiri yaitu:<sup>6</sup>

a. Fungsi Otorisasi

Mengandung pengertian bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

b. Fungsi Perencanaan

---

<sup>5</sup> Pasal 6 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>6</sup> Pasal 10 ayat 1 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

Mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

Mengandung arti bahwa anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

e. Fungsi Distribusi

Mengandung arti bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. Fungsi Stabilisasi

Mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

### **3. Struktur Anggaran Keuangan Daerah**

Keuangan daerah memiliki struktur yang telah mengalami perubahan. Struktur anggaran keuangan daerah diubah dari struktur anggaran tradisional dengan pendekatan anggaran berimbang menjadi struktur anggaran baru dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based*

*budgeting*). Pendekatan berbasis kinerja yang menekankan pencapaian hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBD dikaitkan dengan target kinerja terukur.

Penggunaan sistem penganggaran kinerja di pemerintah daerah telah membawa perubahan yang signifikan terkait dengan perubahan dalam perencanaan anggaran, pengisian anggaran dan pelaporan anggaran. Perubahan struktur anggaran ini secara manajerial berpengaruh terhadap perubahan paradigma anggaran, sedangkan secara teknis berpengaruh terhadap kode rekening dan tata cara pencatatannya.

## **B. Pendapatan Daerah**

### **1. Pengertian Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Berbagai upaya yang telah

---

<sup>7</sup> Nunuy Nur Afiah, *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 44

pemerintah daerah lakukan dalam kegiatan ekonomi akan menghasilkan sejumlah pendapatan yang dapat menambah nilai kekayaan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan asset yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

## **2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat, yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Secara umum pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu:

### **a) Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 yaitu:

#### **a. Pajak Daerah**

---

<sup>8</sup> Mursyidi *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 66

Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah yang terbesar. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya, yakni iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Seperti halnya pajak pada umumnya pajak daerah mempunyai peran ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*Budgetary*)
  - 2) Sebagai alat pengatur (*Regulatory*)
- b. Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah memiliki arti

---

<sup>9</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002), 56



pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>10</sup>

Retribusi Daerah juga dapat diartikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan obyeknya. Obyek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial politik layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Retribusi yang dikenakan pada jasa umum
  - 2) Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha.
  - 3) Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu.
- c. Bagian laba usaha daerah

Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

---

<sup>10</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*  
...85

Penerimaan ini berasal dari BPD, perusahaan daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.<sup>11</sup>

d. Pendapatan asli daerah lain-lain

b) Dana Perimbangan

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2014 tentang Dana Perimbangan. Dana perimbangan ialah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran dan belanja negara yang dialokasikan kepada pemerintah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c) Penerimaan lain-lain yang sah

### **3. Potensi Pendapatan Daerah**

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan dan memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu., misalnya untuk potensi sumber daya alam tambang perlu upaya eksplorasi dan eksploitasi, untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak (*tax effort*). Karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Analisis potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan.

Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari upaya mengenali potensi

---

<sup>11</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 65

pendapatan. Bagi manajer publik, kemampuan mengenali potensi pendapatan dan memanfaatkannya secara optimal merupakan hal penting yang menunjukkan kapasitas *entrepreneurship* mereka dalam mengelola organisasi sektor publik. Osborne dan Gaebler menyatakan pentingnya menumbuhkan pemerintahan wirausaha (*entrepreneurial government*) serta pemerintahan yang mampu menciptakan pendapatan tidak sekedar membelanjakan anggaran (*earning rather than spending*). Menumbuhkan birokrasi wirausaha ini merupakan tantangan bagi manajer publik, terutama kepala daerah dan pejabat terkait di lingkungan pemerintahan daerah.

Potensi pendapatan suatu daerah dengan daerah lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah diakibatkan keterbatasan sumber daya manusia, 'permodalan dan peraturan perundangan yang membatasi. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi
2. Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah
3. Memiliki potensi rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola tinggi

4. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah.<sup>12</sup>

#### 4. Pendapatan Pada Masa Rasulullah

Pada masa-masa awal pemerintahan Islam di Madinah, pendapatan dan pengeluaran negara hamper tidak ada. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin di bidang hokum, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasulullah tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada dase awal ini, hamper seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah.<sup>13</sup> Situasi mulai berubah, setelah turunnya surat Al-Anfal (Rampasan Perang). Pada waktu perang badar tahun 2 Hijriah, sejak itu negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasan perang (*ghanimah*) yang disebut dengan *khums* (seperlima) berupa kuda, unta dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam peperangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ  
التَّقَىٰ الْجُمُعَانَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

<sup>12</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Erlangga, 2010),  
<sup>13</sup> M Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) 2003),  
175

*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu berikan kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 41)*

Selain dari khums, akibat peperangan tersebut juga diperoleh pendapatan baru, berupa uang tebusan dari tawanan perang bagi yang ditebus. Dalam perang badar, orang Makkah menderita kekalahan dan banyak yang ditawan oleh kaum muslim. Rasulullah Saw. kemudian menetapkan besar uang tebusan rata-rata 4.000 Dirham untuk setiap tawanan, tetapi bagi yang tidak ditebus mereka diwajibkan untuk mengajar membaca masing-masing sepuluh orang muslim.

5. Kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan resmi negara negara (penerimaan penuh/resmi karena dapat digunakan sepenuhnya untuk negara), adalah setelah diperolehnya *fa'i* yaitu harta peninggalan suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah yang melanggar Piagam Madinah. Harta yang mereka tinggalkan tidak disebut *ghanimah*, melainkan dijadikan sebagai *fa'i*, yang kemudian dibagikan oleh Rasulullah sesuai dengan ketentuan Allah Swt dalam QS. Al-Hasyr ayat 6”:

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ  
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Dan apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya, dan 'A'llah 'maha' kuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Hasyr: 6)*

Rasulullah kemudian mendapatkan pula penerimaan negara yaitu waqaf, berupa tanah pemberian seorang Rabbi dari Bani Nadhir bernama Mukhairik, yang telah masuk Islam. Ia memberikan tujuh kebunnya kepada Rasulullah dan oleh Rasulullah dijadikan sebagai tanah waqaf.

Adapun sumber pendapatan lain berasal pula dari *kharaj*, yaitu pajak atas tanah yang dipungut kepada non-Muslim ketika Khaibar ditaklukan, pada tahun ke tujuh Hijriah. Jumlah *kharaj* dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. Pemerintahan Rasulullah juga memperoleh '*ushr*, yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang diberikan kepada non-Muslim adalah 5% dan kepada Muslim sebesar 2,5%

Sumber pendapatan zakat dan *'ushr* (sedekah) walaupun sudah diundangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun kedua Hijriyah, namun baru bisa dipungut sebatas zakat fitrah, kewajiban atas zakat mal masih bersifat sukarela. Efektif pelaksanaan atas zakat mal baru terwujud pada tahun kesembilan Hijriyah. Ketika islam telah kokoh, wilayah negara meluas dengan cepat dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam.

## 6. Sumber-sumber Pendapatan Menurut Islam

Pendapatan utama negara (primer) dalam sistem ekonomi Islam, menurut Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal*, berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: *Ghanimah*, *Shadaqoh* dan *Fa'i*. Klasifikasi seperti ini juga dikemukakan oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Majmu'atul Fatawa*. Ibn Taimiyah dalam mengklasifikasikan seluruh sumber pendapatan negara mempertimbangkan asal-usul dari sumber pendapatan negara serta tujuan pengeluarannya. Seluruh sumber pendapatan di luar ghanimah dan sedekah, berada dibawah nama *fa'i*.<sup>14</sup>

Kalau diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaannya, pendapatan negara dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: Pendapatan tidak resmi negara dan pendapatan resmi negara. Pendapatan tidak resmi negara yang terdiri dari *ghanimah* dan *shadaqah* termasuk zakat dan

---

<sup>14</sup> Gusfahmi , *Pajak menurut Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) 143

ushr. Pendapatan tidak resmi ini disebut demikian karena diperuntukkan untuk manfaat tertentu. Meskipun negara bertanggung jawab atas pengumpulannya namun negara wajib mengeluarkannya hanya untuk tujuan pendapatan tersebut dipungut.

Pendapatan resmi negara yang terangkum dalam satu kesatuan nama *fa'i*, terdiri dari jizyah, kharaj, ushr-bea cukai. Maksud pendapatan resmi adalah pendapatan dimana negara berhak membelanjakannya untuk kepentingan seluruh penduduk (kepentingan umum) seperti keamanan, transportasi, pendidikan dan sebagainya. Karena manfaat *fa'i* dapat digeneralisasai, maka penguasa bebas menggunakannya untuk kebaikan umum masyarakat.

Adapun beberapa perbedaan mendasar antara *ghanimah*, *fa'i* dan sedekah (zakat), antara lain sebagai berikut:

- a. *Ghanimah* dan *fa'i* adalah harta yang didapatkan kaum Muslim dari kaum musyrikin atau mereka menjadi penyebab perolehan harta tersebut. Sedangkan zakat adalah murni diperoleh dari kaum Muslim
- b. *Ghanimah* dan *fa'i* dikenakan untuk menghukum mereka, sedangkan zakat u'ntuk membersihkan dan menyucikan mereka.
- c. Distribusi *ghanimah* dan *fa'i* dapat diserahkan kepada ijtihad ulama, sedangkan dist'ribusi zakat tidak boleh berijtihad di dalamnya.



## 7. Prinsip Pendapatan Pemerintah Menurut Sistem Ekonomi Islam

Mengenai pendapatan negara, Allah Swt telah menggariskan secara tegas beberapa sumber primer yang boleh dipungut oleh Ulil Amri, misalnya: zakat, jizyah, fa'i, ghanimah, kharaj dan waqaf disamping pendapatan lain (sekunder) yang merupakan ijtihad para khalifah, berupa sitaan atau denda sebagai sanksi-sanksi atas pelanggaran hukum, *ghulul*, sogok, hadiah/hibah, komisi, uang korupsi dan denda yang harus disetorkan kepada negara.<sup>15</sup>

Islam telah lengkap dan sempurna, sebagaimana firman-Nya:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

*“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu..”*( QS Al-Maidah:3)

Dengan kesempurnaannya, pemerintahan negara Islam seharusnya tidak perlu lagi membuat jenis penerimaan dan pengeluaran baru setiap tahun, karena bab-bab dan penjelasannya telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt. Hal ini memperlihatkan bahwa anggaran belanja negara dalam Islam sudah ditentukan (*qath'i*) sifatnya. Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh ulil amri

---

<sup>15</sup> Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah...*146

dalam melaksanakan pemungutan pendapatan negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap pendapatan dalam negara Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara dan juga harus di salurkan sesuai hukum-hukum syara.

Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيضًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari hari benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS Al Baqarah: 188)*

- b. Harus ada pemisah muslim dan non muslim.  
Islam membedakan subyek zakat dan pajak muslim dengan non muslim dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum muslim. Bagi kaum muslim, pembayaran zakat dan pajak akan bernilai ibadah, sebaliknya bagi non muslim bernilai kehinaan karena kekafiran mereka.
- c. Hanya golongan kaya yang menanggung beban.  
Sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban. Yang menjadi prinsip penting

disini adalah bahwa sumber penerimaan hanya dipungut dari orang kaya saja, sekalipun dari non-Muslim misalnya jizyah. Jizyah tidak dipungut dari orang yang betul-betul tak mampu.

d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum

Adanya tuntutan kemaslahatan umum yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), ulil amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat disaat ada atau tidak adanya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang lagi kemudharatan yang lebih besar.<sup>16</sup>

## **C. Belanja Daerah**

### **1. Pengertian Belanja Daerah**

Biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.<sup>17</sup> Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak.

Pada umumnya pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah.

---

<sup>16</sup> Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah...*149

<sup>17</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah...*87

Keadaan ini dapat dijelaskan dalam kaidah yang dikenal Hukum Wagner, yaitu mengenai adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pendapatan nasional. Walaupun demikian peningkatan pengeluaran pemerintah yang besar belum tentu berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian. Untuk itu perlu dilihat efisiensi penggunaan pengeluaran pemerintah tersebut.

Mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari porsi pengeluaran rutin dan pembangunan juga dapat dilihat dari komposisi pengeluarannya. Dengan demikian efisiensi tidak dapat dilihat melalui satu indikator tertentu melainkan dari beberapa indikator secara bersama-sama. Beberapa indikator yang dapat digunakan sejauh mana efisiensi pengeluaran pemerintah antara lain:

- a) Proporsi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terhadap produk domestik bruto
- b) Perbandingan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
- c) Komposisi pengeluaran rutin

Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi yaitu:

- 1) Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin pemerintah yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Termasuk dalam pengeluaran rutin adalah belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom, bunga, cicilan utang dan lain-lain. Pengeluaran rutin pemerintah

memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan pada setiap tahapan pembangunan.

Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain dapat diupayakan melalui pinjaman, alokasi pengeluaran rutin dan pengendalian kordinasi pelaksanaan pembelian barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan departemen atau lembaga negara non departemen dan mengurangi berbagai subsidi secara bertahap.<sup>18</sup>

## **2. Prinsip Pengeluaran Pemerintah Menurut Sistem Ekonomi Islam**

Sebagaimana halnya penerimaan, pengeluaran negara juga memiliki beberapa prinsip yang harus ditaati ulil amri, yakni sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan pengeluaran kekayaan negara telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt

Sebagaimana halnya pendapatan, tujuan pengeluaran negara juga tidak ditentukan oleh kepala negara maupun kehendak rakyat melalui perundang-undangan yang mungkin ada kecenderungan nafsu pribadi, namun sudah ditetapkan langsung oleh Allah Swt.

---

<sup>18</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah...*99

- b. Apabila ada kewajiban tambahan, maka ia harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ia di pungut  
 Dalam keadaan darurat dan terjadi kekosongan atau kekurangan baitul mal (kas negara) khalifah berhak untuk mengambil harta individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, seperti keamanan, kesehatan dan pendidikan yang tidak terpenuhi oleh kas negara, lalu dipungutlah pajak (*dharibah*). Uang pajak itu harus digunakan untuk kepentingan kaum muslim itu sendiri, misalnya: membuat jalan raya, sekolah-sekolah, menggaji aparat keamanan dan lain-lain.
- c. Adanya pemisahan antara pengeluaran wajib diadakan saat ada atau tidaknya harta dan pengeluaran yang wajib diadakan hanya di saat adanya harta.  
 Tidak semua jenis pengeluaran harus diadakan, melainkan tergantung sifat masing-masing pengeluaran itu. Ada pengeluaran yang wajib diadakan, walaupun tidak ada dana yang tersedia di baitul mal, sehingga khalifah harus meminjam atau memungut pajak. Sebaliknya, ada pengeluaran yang hanya diadakan bila dana itu ada, seperti zakat.<sup>19</sup>

## **D. Pertumbuhan Ekonomi**

### **1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju

---

<sup>19</sup> Gusfahmi , *Pajak menurut Syariah...*158

keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.<sup>20</sup>

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya penambahan atau perubahan pendapatan nasional dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya.<sup>21</sup>

Menurut pandangan ekonom klasik pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang dan modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan.<sup>22</sup> Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya; pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Ketiga komponen pokok dari definisi ini sangat penting artinya:

- a. Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi.

---

<sup>20</sup> Tulus TH Tambunan, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting...*40

<sup>21</sup> Ahmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 1

<sup>22</sup> Mudjarad Kuncoro, *Indikator Ekonomi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2004), 64

- b. Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. Untuk merealisasikan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru.
- c. Penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi harus dilakukan. Inovasi teknologi tanpa disertai inovasi sosial ibarat bola lampu tanpa aliran listrik. Potensi ada tetapi yang melengkapinya tidak akan berarti apa-apa.<sup>23</sup>

Menurut Todaro pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja  
Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabenehnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.
- b. Akumulasi modal  
Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa mendatang.
- c. Kemajuan Teknologi

---

<sup>23</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2004), 221



Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.

Alat ukur untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri.<sup>24</sup> Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

a. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto apabila ditingkat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam nilai absolut dan nilai relatif (persentase). Pertumbuhan dalam nilai absolut dinyatakan dalam rupiah, misalnya PDB tahun 2000 tumbuh Rp 2 triliun rupiah dibandingkan PDB tahun 1999. Sedangkan, pertumbuhan dalam persentase dapat dihitung dengan cara sederhana sebagai berikut:

$$\Delta \text{PDB}(t) + [\text{PDB}(t) - \text{PDB}(t-1)/\text{PDB}(t-1)] \times 100\%$$

Dimana:

$\text{PDB}(t)$  = Pertumbuhan ekonomi tahun (t) tertentu dalam nilai absolut;

---

<sup>24</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan...*243

$PDB(t-1)$  = Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.<sup>25</sup>

Pertumbuhan ekonomi dalam nilai absolut selanjutnya dapat dinyatakan dalam nilai nominal berdasarkan harga berlaku dan nilai riil (nyata) berdasarkan harga konstan. Menurut harga berlaku, artinya nilai barang dan jasa yang dihasilkan (yang totalnya membentuk PDB) dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun bersangkutan, yang berarti kenaikan harga-harga (efek inflasi) turut dihitung. Sedangkan menurut harga konstan, nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar (IHK = 100). Jadi, pertumbuhan PDB dalam nilai riil tidak dipengaruhi oleh perubahan harga yang melekat pada angka-angka agregat ekonomi (PDB).<sup>26</sup>

b. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

## 2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa model pertumbuhan ekonomi yang berkembang hingga saat ini yaitu: Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Teori

---

<sup>25</sup> Tulus TH Tambunan *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting...*79

<sup>26</sup> Tulus TH Tambunan *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting...*80

Pertumbuhan Neo Klasik, Teori Pertumbuhan Harrod-Domar dan Teori Pertumbuhan Kuznet.

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik merupakan salah satu dasar dari teori pertumbuhan ekonomi yang dipakai baik dari dulu sampai sekarang. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi seperti Adam Smith dan David Ricardo.<sup>27</sup>

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA (dalam arti tanah) yang terbatas jumlahnya dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dengan tingkat upah, di atas atau di bawah tingkat upah alamiah (atau minimal). Selain itu perubahan teknologi selalu terjadi yang membuat meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan memperlambat proses *diminishing return* kemerosotan upah dan keuntungan kearah tingkat minimumnya. Menurut teori ini sektor utama sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi adalah pertanian.<sup>28</sup>

Menurut Smith membedakan dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu: Pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total sistem produksi suatu negara dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>29</sup>

1) Sumber Daya Alam yang Tersedia

---

<sup>27</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan...*243

<sup>28</sup> Tulus TH Tambunan, *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisis Empiris...*44

<sup>29</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan...*244

Apabila sumber daya alam belum dipergunakan secara maksimal maka jumlah penduduk dan stok modal merupakan pemegang peranan dalam pertumbuhan output. Sebaliknya pertumbuhan output akan terhenti apabila penggunaan sumber daya alam sudah maksimal.

2) Sumber Daya Insani

Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan angkatan kerja yang bekerja dari masyarakat

3) Stok Barang Modal

Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal.<sup>30</sup>

b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh dua orang ekonomi yaitu: Robert Solow dan Trevor swan. Teori neo klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori pertumbuhan ini juga menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi.<sup>31</sup>

Teori neo klasik juga membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1) Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi

2) Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi

---

<sup>30</sup> Tulus TH Tambunan, *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*...44

<sup>31</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*...263

3) Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi

Teori neoklasik memiliki pandangan dari sudut yang berbeda dari teori klasik yaitu dari segi penawaran. Pertumbuhan ekonomi ini bergantung kepada fungsi produksi.

c. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori Harrod Domar merupakan penyempurnaan dari analisis Keynes yang dianggap kurang lengkap. Dalam teori ini Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Teori ini ingin menunjukkan syarat yang dibutuhkan supaya perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

Harrod-Domar menyatakan supaya seluruh barang modal yang tersedia dapat digunakan sepenuhnya, permintaan agregat harus bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi masa lalu. Jadi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang baik maka nilai investasi dari tahun ke tahun harus selalu naik.<sup>32</sup>

d. Teori Pertumbuhan Kuznet

Pertumbuhan ekonomi Kuznet menunjukkan adanya kemampuan jangka panjang dari pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi

---

<sup>32</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan...256*

kepada rakyatnya. Hal ini dapat dicapai apabila ada kemajuan di bidang teknologi dan kelembagaan.

Teori pertumbuhan Kuznet dalam analisisnya menambahkan enam karakteristik pertumbuhan suatu negara, yaitu:

- 1) Tingginya tingkat pendapatan perkapita
- 2) Tingginya produktifitas tenaga kerja
- 3) Tingginya faktor transformasi struktur ekonomi
- 4) Tingginya faktor sosial idiologi
- 5) Kemampuan perekonomian untuk melakukan perluasan pasar
- 6) Adanya kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi sifatnya terbatas.

### **3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang serba kekurangan modal. Disamping itu, akses untuk mendapatkan bantuan modal ke perbankan juga lebih memihak kepada para pengusaha besar dibandingkan dengan pengusaha ekonomi lemah. Disamping itu pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional juga memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ketidakpastian perekonomian dan perdagangan dunia yang makin meningkat

semakin menyebabkan kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang kurang kurang menggembirakan bagi negara tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

- a. Faktor Produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin.
- b. Faktor Investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar.
- c. Faktor Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah.
- d. Faktor Kebijakan Moneter dan Inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus antisipatif dan dapat diterima pasar.
- e. Faktor Keuangan Negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu untuk membiyai pengeluaran pemerintah.<sup>33</sup>

#### **4. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Sekiranya sumber-sumber daya ekonomi yang ada di tangan umat manusia jumlahnya tidak terbatas maka setiap orang akan mendapatkan apa saja yang ia inginkan dan tentu

---

<sup>33</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan...263*

saja tidak akan ada pembahasan, baik mengenai pertumbuhan maupun alokasi dan distribusi. Akan tetapi, sumber daya-sumber daya itu jumlahnya terbatas. Keterbatasan ini disatu pihak menuntut ekspansi dan pengembangan sumber-sumber ekonomi dan di pihak lain memaksakan setiap orang menggunakan sumber daya-sumber daya yang terbatas itu secara optimal.<sup>34</sup>

Manusia adalah *khalifah* Allah di muka bumi dan semua sumber daya yang ada di tangannya adalah suatu amanah. Oleh karena Allah telah menciptakan manusia, maka hanya Dialah yang memiliki pengetahuan sempurna tentang hakikat makhluk-Nya, kekuatannya dan kelemahannya, hanya Dialah yang memiliki petunjuk yang dengan itu mereka akan dapat hidup secara harmonis dengan alamnya dan kebutuhannya. Meskipun umat manusia diberikan kebebasan untuk memilih atau menolak petunjuk ini, mereka hanya dapat mencapai kebahagiaan (*falah*) dengan mengimplementasikan petunjuk tersebut dalam kehidupan mereka sendiri dan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>35</sup>

Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab kepada-Nya dan mereka akan diberi pahala atau siksa di hari akhirat kelak berdasarkan apakah kehidupan mereka di dunia ini, sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah. Oleh karena itu setiap orang adalah

---

<sup>34</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 287

<sup>35</sup> Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) 6



*khalifah*, dan *khalifah* pada dasarnya mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia. Konsep persaudaraan ini akan tetap menjadi konsep yang kosong dari substansi apabila tidak dibarengi dengan konsep keadilan.

Komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam. kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimumkan output total semata-mata tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimumkan output harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan serta permainan yang *fair* pada semua peringkat interaksi manusia. Hanya pembangunan semacam inilah yang akan selaras dengan tujuan-tujuan syariah (*maqasid asy-syariah*).<sup>36</sup>

Pertumbuhan ekonomi dikatakan baik apabila mampu untuk menciptakan kesejahteraan untuk mengurangi kemiskinan. Banyak sekali model-model pemikir barat dalam menerangkan suatu konsep mengenai pertumbuhan ekonomi, akan tetapi konsep tersebut masih saja memiliki kekurangan sehingga tidak bisa bertahan dalam jangka panjang karena sifat dari sistem yang digunakan berdasarkan konsep liberal, karena

---

<sup>36</sup> M. Fahmi Khan dan Suherman Rosyidi, *Esai-Esai Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 224

masih terdapat ketidaksesuaian dan ketidakadilan yakni kurang meratanya pendapatan di setiap penjuru, sehingga pendapatan hanya mengalir pada segelintir orang-orang kaya saja.

Dalam QS Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman agar kekayaan atau harta tidak hanya berputar dikalangan orang mampu saja.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ  
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS Al-Hasyr: 7)*

Perintah yang tertera dalam ayat diatas, diharapkan dapat mencegah terjadinya kecemburuan sosial dan tindakan kriminal. Harta kekayaan sangat penting dan perlu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerataan berjalan dengan

baik sehingga tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dan miskin.<sup>37</sup>

## **E. Produk Domestik Regional Bruto**

### **1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto**

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Peningkatan nilai tambah dari suatu bahan baku (input) menjadi produk (output) menunjukkan adanya perkembangan ekonomi suatu wilayah. Dalam statistik neraca nasional, perkembangan nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, jasa-jasa dicatat dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian PDRB merupakan hasil dari penjumlahan dari seluruh nilai tambah (*value added*) produksi barang dan jasa dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu.<sup>38</sup>

### **2. Metode Perhitungan PDRB**

pada perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan

---

<sup>37</sup> Zaini Ibrahim, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektik Ekonomi Islam, Islamics Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol.2 No.1, (Juli-Desember, 2011), 26

<sup>38</sup> Tulus TH Tambunan, *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisis Empiris...53*

jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahu acuan atau tahun dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat dihitung melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang dimaksud metode langsung adalah metode perhitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah. Perhitungan dengan metode langsung dapat dilakukan dengan tiga macam pendekatan yaitu:

1. Metode Langsung<sup>39</sup>

- a. Pendekatan Produksi

Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara lain dari masing-masing nilai produksi bruto dari setiap sektor ekonomi, nilai tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai input antara nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa factor produksi atas keikutsertaanya dalam proses produksi.

- b. Pendekatan Pendapatan

---

<sup>39</sup> Mudjarad Kuncoro, *Indikator Ekonomi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2004), 72

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung netto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan sebagainya.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial, pembentukan modal dan ekspor, nilai barang dan jasa hanya berasal dari produk domestik, penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung merupakan perhitungan dengan cara menggunakan data yang bersumber dari luar daerah/wilayah yang bersangkutan, seperti dengan cara alokasi yaitu mengalokir PDB Nasional menjadi PDRB Provinsi dengan menggunakan beberapa indikator produksi dan indikator lainnya yang cocok sebagai alokator. Perkiraan dilakukan berdasarkan alokasi dengan

mengalokasikan data tersebut ke daerah yang bersangkutan.

### **3. Faktor yang Mempengaruhi PDRB**

#### **a. Perubahan Harga**

Yaitu kenaikan/penurunan perekonomian dihitung berdasarkan perubahan yang terjadi di pasar. Pada umumnya harga tersebut cenderung menaik sehingga pendapatan regional atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun selalu menunjukkan kenaikan.

#### **b. Perubahan Riil**

Yaitu kenaikan/penurunan perekonomian dihitung berdasarkan perubahan riil, artinya tidak termasuk lagi perubahan harga. Pendapatan regional atas dasar harga berlaku yang telah dikurangi dengan perkembangan inflasi dikenal dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan.

### **4. Klasifikasi PDRB Sektor Perekonomian**

*United Nation* (UN) memberikan rekomendasi bahwa secara makro, perekonomian diklasifikasikan menjadi 9 sektor, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Konstruksi/Bangunan

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, persewaan dan Jasa perusahaan
9. Jasa-jasa<sup>40</sup>

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan mendata dan mengevaluasi seluruh hasil studi atau penelitian terutama pada skripsi yang lebih dahulu membahas fokus yang sama harus digali kelebihan dan kekurangan skripsi yang telah ada.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai PDRB, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Nur Hajiyanti	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah	Keuangan Daerah menjadi obyek penelitian	Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independent yakni: PDRB, PAD, Dana Alokasi Umum dan	Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh

---

<sup>40</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan...*266

				Dana Alokasi Khusus. Sedangkan pada penelitian saat ini hanya terdapat 2 variabel independent yakni pendapatan dan belanja daerah	secara signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.
2	Christi Stella Manoi	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB	Terdapat persamaan variabel yakni, variabel Y= Produk Domestik Regional Bruto. Penelitian ini menggunakan	Pada penelitian ini terdapat satu variabel independen yakni pengeluaran pemerintah. Berbeda dengan penelitian	80,3% PDRB sektor pertanian dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dengan taraf nyata 30%



			metode penelitian kuantitatif.	saat ini yang memiliki dua variabel independen yakni Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.	
3	Reza Mananto Berutu	Pengaruh APBD terhadap perekonomian di Kabupaten Dairi	Penelitian ini membahas mengenai keuangan daerah. yang dibahas pula oleh peneliti saat ini.	Pada penelitian ini, objek penelitian adalah data berupa anggaran keuangan daerah. Sedangkan pada penelitian saat ini digunakan data riil keuangan daerah.	APBD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

4	Wiratno Bagus Suryono	Analisis Pengaruh PAD, Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah	Persamaan penelitian dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti dengan PDRB sebagai variabel Y	Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Chi Square. Berbeda dengan peneliti saat ini yang menggunakan Analisis Regresi Berganda sebagai metode analisis data.	Berdasarkan hasil regresi tingkat investasi sebesar 0,036 disimpulkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.
---	-----------------------	---	--	--	--

### G. Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis juga dapat berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu diantara dua variabel atau lebih, yang kebenaran

hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yakni Pendapatan Daerah (X1), Belanja Daerah (X2) dan Produk Domestik Regional Bruto (Y). Penulis menduga bahwa adanya pengaruh Pendapatan Daerah (X1) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y). maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_o^1$  : Diduga tidak terdapat pengaruh antara pendapatan daerah terhadap produk domestik regional bruto.

$H_a^1$  : Diduga terdapat pengaruh positif antara pendapatan daerah terhadap produk domestik regional bruto.

Selain itu penulis pun menduga terdapat pengaruh antara Belanja Daerah (X2) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y), maka dapat dirumuskan dalam hipotesis di bawah ini:

$H_o^2$  : Diduga tidak terdapat pengaruh antara belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto.

$H_a^2$  : Diduga terdapat pengaruh positif antara belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto.

Hipotesis ketiga berkaitan dengan dugaan adanya pengaruh antara Pendapatan Daerah (X1) dan Belanja Daerah (X2) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y), hipotesis yang digunakan penulis adalah:

---

<sup>41</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 44

$H_0^3$  : Diduga tidak terdapat pengaruh antara pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto.

$H_a^3$  : Diduga terdapat pengaruh positif antara pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto.